

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep yang memberikan penekanan terhadap pentingnya hak pemegang saham guna memperoleh informasi dengan akurat, benar, serta tepat waktu disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Tidak hanya itu GCG juga menunjukkan kewajiban suatu perusahaan untuk menjelaskan semua informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan secara akurat, benar, tepat waktu dan transparan. Menurut Darmawati (2015), GCG bukan hanya sebagai aksesoris belaka, namun usaha untuk melakukan peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Hal ini berlaku untuk perusahaan yang sudah publik maupun tertutup.

Topik yang sangat menarik pada belakangan ini ialah mengenai *Corporate governance*. Hal ini berawal sejak terjadinya krisis finansial di berbagai negara di tahun 1997-1998. Diawali krisis yang terjadi di Thailand, Jepang, Korea, Indonesia, Malay, Hongkong, dan Singapura yang berimbas kepada krisis finansial asia. Praktik GCG yang lemah di negara-negara asia menyebabkan krisis finansial. *Corporate governance* mengalami peningkatan pada saat terbukanya skandal keuangan yang berskala besar seperti skandal besar Enron. Perusahaan Enron merupakan perusahaan yang pertumbuhan finansialnya sangat pesat sebelum tahun 2002. Skandal ini mulai terungkap ketika pada awal 2002 perhitungan atas total *revenue* Enron di tahun 2000 yang sebelumnya berjumlah 100,8 milyar USD menjadi hanya Sembilan milyar USD. Skandal finansial “megadolar” yang disebabkan adanya *misleading financial statement* membawa

dampak yang luar biasa antara lain; Enron pailit, kurangnya kepercayaan atas informasi keuangan, rusaknya citra profesi akuntan di Amerika, dan hilangnya ratusan juta dolar uang yang diinvestasikan di Enron (Arifin, 2005). Beberapa kasus juga terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk., yang melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005).

Dengan melihat kasus tersebut, sangat membuktikan bahwa penerapan *corporate governance* masih sangat lemah, karena praktik manipulasi laporan keuangan masih tetap dilakukan walaupun sudah menjauhi krisis, yaitu tahun 1997-1998. Bukti menunjukkan lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi dalam pembuatan keputusan dan tindakan perusahaan (Alijoyo *et al.*, 2004).

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang GCG bukan hanya sebagai aksesoris, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Darmawati, 2015). *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkat efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. *corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang

memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring (Darmawati dkk., 2004).

Porter (1991) menyatakan bahwa terdapat alasan mengapa perusahaan sukses atau gagal mungkin hal itu lebih disebabkan karena adanya strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut di antaranya mencakup strategi penerapan system *corporate governance* dalam perusahaan. Struktur dalam *corporate governance* bias menjadi tolok ukur dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan pada suatu perusahaan. Selama tahun-tahun terakhir ini, *corporate governance* sangat populer. Tidak hanya populer, tetapi *corporate governance* tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Hal tersebut terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, *corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan dalam bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang (Wolfensohn, 2015).

Penelitian mengenai efektivitas *corporate governance* telah banyak dilakukan oleh para peneliti, antara lain: Midiastuty & Machfoedz (2003). Akan tetapi penelitian yang dilakukan hanya mencakup penelitian pada perusahaan yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI), tetapi tidak mencakup perusahaan perbankan. Padahal perusahaan perbankan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas *corporate governance* di industri perbankan tersebut.

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR

minimum. Bank Indonesia (BI) menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut termasuk dalam bank yang sehat atau tidak). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, BI sebagai pengawas tunggal perbankan secara konsisten akan terus berupaya agar perkembangan system perbankan di Indonesia menuju ke arah sistem perbankan yang sehat dan kokoh. Sebagai konsekuensinya, dalam masa transisi bank-bank yang lemah harus mencari sendiri cara penyelesaian yang terbaik untuk memperkuat posisinya berdasarkan situasi dan kompetisi pasar tanpa campur tangan dari BI. Sikap BI dan komitmen untuk mendorong ke arah terciptanya system perbankan yang sehat dan kokoh berdasarkan standar internasional yang akan menjamin adanya pengakuan internasional terhadap perbankan di Indonesia dalam era globalisasi.

Manajemen laba banyak dilakukan oleh manajer kinerja keuangan, tujuannya adalah supaya perusahaan mereka masuk kedalam kriteria yang disyaratkan oleh Bank Indonesia (Setiawati & Na'im 2001). Setiawati & Na'im (2001) berpendapat laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan munculnya distorsi dalam pengalokasi dana. Sedangkan industri perbankan itu sendiri merupakan industri kepercayaan bagi para investor. Apabila laporan keuangan yang bias yang diakibatkan oleh tindakan manajemen laba dapat membuat berkurangnya kepercayaan investor yang terjadi adalah investor tersebut akan melakukan penarikan dana secara bersama sama. Yang nantinya akan mengakibatkan *rush*.

Maka dari itu, sangat dibutuhkan adanya mekanisme yang dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan tindakan manajemen laba yang

dilakukan oleh perusahaan perbankan yang ingin dapat masuk dalam kriteria Bank Indonesia. Menurut Caprio & Levine (Sam'ani 2008), ada dua hal yang berkaitan dengan lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh terhadap *corporate governance*. Pertama, bank adalah sektor usaha yang tidak transparan, sangat memungkinkan untuk dapat terjadi masalah keagenan. Hal kedua, bank adalah sektor usaha yang mempunyai tingkat regulasi tinggi. Dalam hal tertentu tingkat regulasi tinggi justru akan dapat menghambat mekanisme *corporate governance*. Terdapat dua kategori pada masalah keagenan dalam sektor keuangan perbankan. Pertama masalah keagenan yang diakibatkan oleh hutang dan kedua masalah keagenan yang disebabkan oleh kepemilikan serta pengendalian (*separation of ownership and control*)

James D. Wolfensohn, Presiden of the World Bank tahun 1999 menyatakan bahwa terdapat dua teori utama yang memiliki keterkaitan dengan *corporate governance*. Hal itu adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Sedangkan, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael John, seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen sebagai *agents* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam

stewardship model. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya. Dengan demikian “*manajer could not be trusted to do their job which of course is to maximize shareholder value*”.

Dalam *agency theory*, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain atau karyawan (*agent*) untuk dapat memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan atau melimpahkan wewenangnya terhadap *agent* tersebut (Aljana & Agus, 2017). Seorang manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih banyak mengetahui tentang keadaan perusahaan tersebut dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, seorang manajer berkewajiban untuk memberikan informasi perusahaan terhadap pemilik perusahaan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ada pada perusahaan. Kondisi ini yang disebut dengan informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Haris, 2004). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja keuangan pada perusahaan (Dewi & Moh, 2016).

Manajer perusahaan yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas pemilik. Dengan informasi yang dimiliki manajer dapat bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengorbankan kepentingan pemilik, sehingga informasi yang disampaikan kepada pemilik tidak

sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Richardson (Ujianto & Pramuka, 2007) menerangkan bahwa kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri antar manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Dewi & Moh, 2016).

Menurut Dechow (Siallagan & Machfoedz, 2006), manajemen yang ingin menunjukkan kinerja yang baik dapat termotivasi untuk memodifikasi laporan keuangan agar menghasilkan laba seperti yang diinginkan oleh pemilik manajemen sebagai pihak yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dievaluasi dan dihargai berdasarkan laporan keuangan yang dibuatnya sendiri. Hal ini diprediksi dapat menimbulkan manipulasi laba yang sering diartikan sebagai manajemen laba.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil sampel dari populasi pada laporan keuangan perusahaan perbankan yang sudah go public mulai dari tahun 2016-2018. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai corporate governance, namun penelitian tersebut tidak memasukkan perusahaan perbankan yang telah *listing* di BEI.

1.2 Rumusan masalah

Salah satu elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi ekonomis, yang berhubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, dan para pemegang saham serta stakeholder lainnya agar perusahaan perbankan dapat mengalami

pertumbuhan dan perkembangan secara sehat yaitu *corporate governance*. Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui ada atau tidak hubungan mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, GCG, Earnings, Capital*) terbagi menjadi 3 variabel, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perbankan.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan serta para pemegang saham yang akan menerapkan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.
2. Manfaat Bagi Akademik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.
3. Manfaat Bagi Peneliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia, khususnya pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.